

Analysis of the Role of the Government and Society on Zakat in East Java Province

Analisis Peran Pemerintah dan Masyarakat terhadap Perzakatan di Provinsi Jawa Timur

Hashfi Hizrian Atiqi, Tika Widiastuti 

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
hashfi.hizrian.atiqi-2015@feb.unair.ac.id*, tika.widiastuti@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam perzakatan di Jawa Timur. Hal tersebut dinilai dengan menggunakan dimensi makro pada indeks zakat nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan alat analisis Indeks Zakat Nasional. Penelitian dilakukan dengan memberi kuesioner kepada pihak Lembaga Amil Zakat terkait data yang dibutuhkan. Hasil yang didapat pada dimensi makro adalah 0,31 yang mana menunjukkan nilai yang kurang baik. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih rendahnya dukungan APBD untuk biaya operasional Lembaga Amil Zakat dan nilai rasio muzakki baik individu maupun badan usaha yang masih sangat rendah.

Kata Kunci: Lembaga Amil Zakat, Indeks Zakat Nasional, Dimensi Makro, Kinerja.

Informasi Artikel

Submitted: 27-07-2021

Reviewed: 17-01-2022

Accepted: 25-01-2022

Published: 30-03-2022

^{*)}Korespondensi (Correspondence):
Hashfi Hizrian Atiqi

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



ABSTRACT

This study aims to determine the role of government and society on zakat in East Java. These roles are assessed using the macro dimensions of the national zakat index. This study uses a quantitative descriptive research method with the National Zakat Index analysis tool. The research was conducted by distributing questionnaires to Amil Zakat Institutions regarding the required data. The results obtained by the zakat institution on the macro dimension is 0.31 which indicates a poor value. This was caused by several factors, including the low budget support for operational costs of Amil Zakat Institution and the very low value of the muzakki ratio for both individuals and business entities.

Keywords: Amil Zakat Institution, National Zakat Index. Macro Dimension, Performance.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi masalah utama yang dihadapi oleh dunia Islam saat ini (Beik, 2015). Dalam Islam terdapat mekanisme pengentasan kemiskinan yang dikenal dengan zakat. Zakat adalah instrumen ibadah yang memiliki nilai sosial ekonomi yang sangat kuat. Dalam QS. Ar-Rum: 39 disebutkan bahwa salah satu fungsi zakat yaitu sebagai antitesa dari sistem perekonomian ribawi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mengurangi sistem ribawi adalah dengan memperbaiki kinerja suatu lembaga yang mengelola zakat (Mubarokah, 2017). Zakat memiliki ketentuan khusus, baik dari sisi penghimpunan, kriteria wajib zakat, penyaluran, kriteria mereka yang berhak menerima zakat, dan harta objek zakat. Sehingga, pemanfaatannya tidak dapat sembarangan (Beik 2016).

Zakat di Indonesia dikelola secara nasional oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS dalam pengelolaannya memiliki cabang pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selain BAZNAS yang terintegrasi langsung dengan pemerintah, pengelolaan zakat juga dilakukan secara swasta yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengelolaan zakat meliputi pengumpulan dan pendistribusian. Baiknya pelaksanaan dua aspek tersebut menunjukkan semakin baik kinerja suatu lembaga zakat. Pengelolaan zakat yang baik diharapkan bisa menekan tingkat kemiskinan agar lebih rendah. Untuk menjamin terlaksananya

pengelolaan zakat yang baik, diperlukan alat untuk mengukur kinerja dari lembaga tersebut. Pusat Kajian Strategi (Puskas) BAZNAS menetapkan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat yang dinamakan dengan Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN bertujuan untuk melihat sejauh mana kontribusi pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan zakat serta dampak zakat terhadap mustahik. IZN dapat diaplikasikan pada tingkat pusat dan tingkat daerah. Tujuan IZN adalah agar semua pihak yang terlibat dalam perzakatan dapat mengukur diri dan meningkatkan kinerja sehingga semua institusi zakat dapat membantu perkembangan perzakatan di Indonesia (Puskas BAZNAS 2016). Penelitian tentang penilaian kinerja perzakatan dengan menggunakan alat ukur IZN, sebelumnya telah dilakukan di beberapa tempat untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Diantaranya adalah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyuwangi. Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS Jawa Timur pada September 2018 mencapai angka 4,292 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk miskin seharusnya bisa ditekan dengan meningkatkan kinerja penyaluran zakat BAZNAS Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2017 adalah 4.617,01 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin 11,77 persen kemudian tahun 2018 menurun menjadi 4.332,59 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin 10,98 persen dan pada tahun 2019 menjadi 4.112,25 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,37 persen (BPS Jawa Timur, 2020).

Tabel 1.

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur, 2011-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2011	219 727	5 388,97	14,27
2012	233 202	5 099,01	13,40
2013	257 510	4 805,01	12,55
2014	282 796	4 786,79	12,42
2015	305 171	4 789,12	12,34
2016	321 761	4 703,30	12,05
2017	342 092	4 617,01	11,77
2018	373 574	4 332,59	10,98
2019	397 687	4 112,25	10,37
2020	416 001	4 419,10	11,09
2021	429 133	4 572,73	11,4

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat cenderung menurun, namun persentase jumlah penduduk miskin masih belum mencapai target angka kemiskinan Millenium Development Goals (MDGs). Target kemiskinan untuk Indonesia dalam MDGs diharapkan jumlah penduduk miskin mencapai 7,55 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. BAZNAS Jawa Timur seharusnya bisa meningkatkan kinerja pengelolaan zakat khususnya dalam hal penyaluran guna mendukung target pemerintah untuk mengurangi jumlah warga yang hidup di bawah garis kemiskinan ke angka 7,55 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Timur berdasarkan dimensi makro Indeks Zakat Nasional? Tujuan Penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Timur berdasarkan pendekatan dimensi makro pada Indeks Zakat Nasional.

II. KAJIAN LITERATUR

Penelitian mengenai kinerja perzakatan dengan pendekatan Indeks Zakat Nasional sebelumnya pernah dilakukan, salah satunya berjudul Analisis Kinerja Perzakatan Provinsi Jawa Tengah oleh Isro'iyatul Mubarakah (2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari dimensi makro sisi regulasi adalah tidak baik. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya regulasi di tingkat daerah (perda) yang mengatur pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah.

Indikator Dukungan APBD pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga tidak baik diakibatkan belum adanya biaya operasional BAZNAS Provinsi yang didukung dengan APBD. Kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah pada indikator database lembaga zakat juga tidak baik. Hal itu disebabkan karena jumlah database lembaga zakat terdaftar hanya satu lembaga, rasio muzakki individu jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah rumah tangga di Jawa Tengah, dan belum ada muzakki badan yang membayar zakat melalui BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Kinerja perzakatan Provinsi Jawa Tengah dari dimensi mikro pada indikator kelembagaan adalah baik dan indikator dampak zakat juga baik. Kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah secara umum adalah cukup baik.

Penelitian selanjutnya berjudul Analisis Kinerja BAZNAS Banyuwangi dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional oleh Hurun Eka Ayu Putri (2018). Berbeda dibanding penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan dalam lingkup Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja zakat BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis berupa Indeks Zakat Nasional (IZN) yang mana telah dirumuskan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks dimensi makro dan mikro berturut-turut adalah 0,3495 dan 0,46, sehingga nilai IZN adalah 0,4158, menandakan kinerja BAZNAS Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan adalah cukup baik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yunita Hermawati Putri (2017) dengan judul Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga menggunakan Indeks Zakat Nasional sebagai alat analisisnya. Nilai IZN dari BAZNAS Kota Yogyakarta adalah 0.4338. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS kota Yogyakarta sudah cukup baik. Nilai indeks pada dimensi makro, adalah 0.0495 dengan kategori kinerja tidak baik. Nilai indeks pada dimensi mikro yaitu 0.69 dan termasuk dalam kategori kinerja baik.

Indeks Zakat Nasional adalah indeks yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS, disusunnya indeks zakat nasional bertujuan untuk sebagai alat pengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional. Pusat Kajian Strategis BAZNAS berharap indeks zakat nasional bisa menjadi indikator yang dapat memberi gambaran pada tingkat apa zakat sudah berdampak pada kesejahteraan mustahik, serta menunjukkan pada tingkatan apa lembaga zakat sudah dibangun baik dari sisi internal maupun eksternal. Internal dari sisi lembaga zakat itu sendiri dan eksternal dari sisi pemerintah dan mustahik yang menerima dana zakat (Puskas BAZNAS, 2016: 11). Pada tanggal 14 Februari tahun 2020 Puskas Baznas menerbitkan revisi komponen dan formula penghitungan IZN yang disahkan dalam Surat Keputusan Kepala Pusat Kajian Strategis BAZNAS Nomor:07/PUSKAS-BAZNAS/II/2020 tentang Komponen dan Formula Perhitungan Indeks Zakat Nasional.

Indeks zakat nasional disusun menggunakan metode penelitian campuran. Metode ini mengintegrasikan metode kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pembuatan model estimasi penghitungan indeks zakat nasional menggunakan metode kuantitatif sedangkan penyusunan komponen yang membentuk indeks zakat nasional yang berupa dimensi, indikator dan variabel menggunakan metode kualitatif.

Metode *Multi-Stage Weighted Index* digunakan sebagai metode estimasi penghitungan untuk mendapatkan nilai indeks zakat nasional. Metode ini menggabungkan beberapa tahap pembobotan yang diberikan pada dimensi, indikator dan variabel yang merupakan komponen penyusun indeks. Metode ini digunakan karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa komponen penyusun indeks zakat nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu dimensi, indikator, dan variabel, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut harus dilakukan secara bertahap khususnya terhadap indikator yang diturunkan kedalam variabel-variabel tertentu. Nilai indeks dari masing-masing variabel dihitung dengan cara sabagaimana di bawah ini:

$$I_i = \frac{(S_i - S_{min})}{(S_{max} - S_{min})} \dots \dots \dots (1)$$

di mana,

- I_i = Indeks pada variabel i
- S_i = Nilai skor aktual pada pengukuran variabel i
- S_{min} = Skor minimum
- S_{max} = Skor maksimum

Indeks zakat nasional terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. masing-masing dimensi tersebut diturunkan ke dalam indikator-indikator. Dimensi makro diturunkan ke dalam indikator regulasi, indikator dukungan APBD, dan database lembaga zakat. Dimensi mikro diturunkan ke dalam dua indikator yaitu indikator kelembagaan yang menilai dari internal lembaga zakat, kemudian indikator dampak zakat yang menilai sejauh mana kesejahteraan mustahik setelah menerima dana zakat.

Indikator database lembaga zakat diperinci ke dalam tiga variabel seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas yaitu variabel jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, mustahik. variabel selanjutnya adalah rasio muzakki individu dan yang terakhir variabel rasio muzakki badan usaha. indikator kelembagaan memiliki 4 variabel yaitu pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan. untuk indikator terakhir yang memiliki variabel adalah indikator dampak zakat yang diturunkan ke dalam variabel indeks kesejahteraan cibest, variabel modifikasi IPM, dan variabel kemandirian.

III. METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Menilai peran pemerintah dan masyarakat terhadap perzakatan dinilai menggunakan dimensi makro pada indeks zakat nasional. Dimensi makro adalah dimensi yang menunjukkan peran serta partisipasi pemerintah dan masyarakat untuk membangun lembaga zakat. Dimensi ini memiliki 3 indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah daerah, dan database lembaga zakat. Indikator regulasi adalah indikator yang menunjukkan peran pemerintah terhadap perzakatan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang zakat, atau bisa dalam bentuk instruksi pemerintah daerah. Indikator Dukungan Anggaran Pemerintah menunjukkan seberapa besar rasio antara dana yang dianggarkan pemerintah untuk lembaga zakat dengan kebutuhan biaya operasional lembaga zakat. Indikator regulasi dan dukungan anggaran pemerintah tidak dirinci ke dalam variabel tertentu, sedangkan indikator database lembaga zakat diturunkan menjadi 3 variabel yaitu: jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, dan mustahik, rasio muzaki individu yang menjelaskan tentang seberapa banyak muzakki yang membayar zakat pada lembaga terkait dibandingkan dengan jumlah rumah tangga daerah yang diteliti, dan rasio muzaki badan usaha yang menjelaskan penbandingan jumlah badan usaha yang membayarkan zakatnya ke lembaga terkait dengan jumlah badan usaha yang ada (Puskas BAZNAS, 2016).

Dimensi mikro merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat dari zakat yang disebut sebagai mustahik. Dimensi mikro memiliki dua indikator yaitu kelembagaan dan dampak zakat. Indikator kelembagaan kemudian dibuat lebih terperinci ke dalam 4 variabel yang mengukur performa lembaga dari aspek penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Sedangkan indikator dampak zakat merupakan gabungan 5 variabel yang melihat dampak secara ekonomi, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian (Puskas BAZNAS, 2016). Penelitian ini hanya menilai dimensi makro sedangkan dimensi mikro dikesampingkan karena penilaian dimensi mikro terkait mustahik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode ini digunakan dalam mendukung analisis metode kuantitatif yang didasarkan pada faktor masalah yang akan dideskripsikan. metode kuantitatif digunakan untuk mencari objek penelitian berupa variabel penelitian (Mubarokah, 2017).

Data

Responden untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini terdiri dari pegawai BAZNAS Jawa Timur untuk memenuhi data pada dimensi makro dan indikator kelembagaan pada dimensi mikro. Data primer untuk dimensi makro dan indikator kelembagaan didapat dengan melakukan pemberian kuesioner terhadap pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang memiliki pemahaman mendalam terkait permasalahan yang sedang diteliti. Pihak BAZNAS Provinsi Jawa Timur mengarahkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dan dengan Kepala Bagian Umum BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Pada penelitian ini

data sekunder yang digunakan adalah data dari Badan Pusat Statistik, jurnal penelitian indeks zakat nasional, dan lain-lain.

Teknik Analisis

Peneliti memakai teknik analisis yaitu indeks zakat nasional atau disingkat IZN. Teknik estimasi penghitungan yang dilakukan untuk mendapatkan nilai IZN menggunakan metode *Multi-Stage Weighted Index* yang menggabungkan beberapa tahapan pembobotan yang diberikan pada setiap komponen yang menyusun indeks zakat nasional. Metode ini merupakan pendekatan yang paling tepat karena komponen penyusun IZN terdiri dari tiga bagian, yaitu dimensi, indikator, dan variabel, sehingga pemberian bobot pada setiap komponen tersebut harus dilakukan secara bertahap dan prosedural. Detail komponen penyusun Indeks Zakat Nasional dan bobot kontribusi dari tiap dimensi, indikator dan variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Komponen Indeks Zakat Nasional beserta bobotnya

Dimensi	Bobot Kontribusi	Indikator	Bobot Kontribusi	Variabel	Bobot Kontribusi		
Makro (X ₁)	0,3	Regulasi (X ₁₁)	0,4	Jumlah Lembaga Zakat Resmi, Muzakki, Mustahik (X ₁₃₁)	0,3		
		Dukungan APBD (X ₁₂)	0,2				
		Database Lembaga Zakat (X ₁₃)	0,4			Rasio Muzakki Individu terhadap Rumah Tangga (X ₁₃₂)	0,4
		Kelembagaan(X ₂₁)	0,4			Rasio Muzakki Badan (X ₁₃₃)	0,3
							Pengumpulan (X ₂₁₁)
Pengelolaan (X ₂₁₂)	0,2						
Mikro (X ₂)	0,7	Dampak Zakat(X ₂₂)	0,6	Penyaluran (X ₂₁₃)	0,3		
				Pelaporan(X ₂₁₄)	0,2		
				Indeks Kesejahteraan CIBEST (X ₂₂₁)	0,5		
				Modifikasi IPM (X ₂₂₂)	0,2		
				Variabel Kemandirian (X ₂₂₃)	0,3		

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020

Tabel 3.
Kriteria Nilai Indeks Zakat Nasional

Kriteria	Nilai Indeks Zakat Nasional
Tidak Baik	0,00-20
Kurang Baik	0,21-0,40
Cukup Baik	0,41-0,60
Baik	0,61-0,80
Sangat Baik	0,81-1,00

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis peran pemerintah dan masyarakat dinilai dengan menggunakan dimensi makro pada indeks zakat nasional. Dimensi makro terdiri dari tiga indikator. Indikator pertama adalah regulasi yang pada penelitian ini menunjukkan keberadaan peraturan daerah yang mendukung BAZNAS dalam menjalankan fungsinya dalam mengelola zakat. Indikator kedua adalah dukungan APBD yang menunjukkan seberapa besar APBD dialokasikan untuk membantu operasional BAZNAS. Indikator terakhir pada dimensi makro adalah database lembaga zakat yang menggambarkan kelengkapan data yang dimiliki BAZNAS terkait jumlah muzakki, mustahik, lembaga zakat yang terdaftar pada BAZNAS dan rasio muzakki individu dan badan usaha.

Indikator Regulasi

BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan pada regulasi diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan UU no.23 tahun 2011. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Jawa Timur juga berlandaskan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2014, kemudian Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014, Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten kota, dan lain-lain.

Regulasi-regulasi di atas adalah regulasi yang mengatur secara umum dan bukan dalam bentuk peraturan daerah. Sejauh ini regulasi yang dimiliki BAZNAS Provinsi Jawa Timur pada tingkat daerah adalah INSTRUKSI Gubernur.I/INST/2017. Keberadaan Instruksi Gubernur tersebut membuat BAZNAS Provinsi Jawa Timur mendapat skor 3 pada skoring skala likert karena memiliki regulasi hanya dalam bentuk peraturan dan bukan dalam bentuk Perda. Skor 3 yang didapat perlu dihitung kembali ke dalam formula di bawah untuk mendapatkan nilai indeks pada indikator regulasi.

$$\frac{3-1}{5-1} = 0,5$$

Hasil penghitungan nilai indeks untuk indikator Regulasi adalah nol koma lima yang menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Jawa Timur pada indikator ini adalah cukup baik. Sebagai mana dijelaskan sebelumnya hal tersebut disebabkan karena BAZNAS Jawa Timur memiliki peraturan yang mengatur pengelolaan zakat di Provinsi tersebut.

Indikator Dukungan APBD

BAZNAS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 mendapatkan bantuan biaya dari APBD sebesar Rp 300.000.000,00. Biaya operasional BAZNAS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.334.511.618,00. Rasio kontribusi APBD terhadap biaya operasional didapat dengan membandingkan jumlah kontribusi APBD dengan jumlah biaya operasional dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{300.000.000}{1.334.511.618} \times 100\% = 22,48\%$$

Dukungan APBD terhadap beban operasional adalah sebesar 22,48%, membuat BAZNAS Provinsi Jawa Timur mendapatkan skor 2. Nilai indeks dari indikator Dukungan APBD dihitung dengan cara di bawah ini:

$$\frac{2-1}{5-1} = 0,25$$

Indikator Dukungan APBD setelah dihitung mendapat nilai indeks sebesar 0,25, nilai tersebut berarti bahwa dukungan APBD terhadap biaya operasional untuk menunjang kinerja BAZNAS Jawa Timur masih kurang baik, karena rasio dukungan APBD terhadap biaya operasional berdasarkan tabel skoring skala likert berada pada posisi sekurang-kurangnya 20% dari biaya operasional.

Indikator Database Lembaga Zakat

Indikator database lembaga zakat adalah satu-satunya indikator di dalam dimensi makro yang dirincikan ke dalam bentuk variabel-variabel. Variabel-variabel tersebut adalah variabel jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, dan mustahik. Variabel selanjutnya adalah rasio muzakki individu yang menunjukkan angka perbandingan antara muzakki yang sudah membayarkan zakatnya melalui BAZNAS dengan jumlah rumah tangga yang ada di daerah yang diteliti. Variabel terakhir adalah rasio muzakki badan usaha yang membandingkan jumlah badan usaha yang sudah membayarkan zakatnya melalui BAZNAS dengan jumlah badan usaha di daerah yang bersangkutan.

Variabel Jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, dan mustahik

Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan menyatakan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah muzakki perorangan adalah 7.997 jiwa dan muzakki badan berjumlah 5 muzaki. Jumlah mustahik yang terdaftar pada tahun 2019 adalah 27.361 jiwa. Lembaga zakat yang terdaftar di BAZNAS Provinsi Jawa Timur yaitu LAZ Nurul Falah, LAZ Yayasan Persyada Al-Haromain, LAZ Yayasan Sahabat Mustahik Sejahtera, LAZ Yayasan Sidogiri, dan LAZ IZI. Skor dari variabel jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, dan mustahik adalah 3, karena memiliki data jumlah

lembaga zakat yang terdaftar, serta jumlah muzakki dan mustahik. Penghitungan nilai indeks pada variabel ini sebagai berikut :

$$\frac{3-1}{5-1} = 0,5$$

Variabel jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, dan mustahik mendapat nilai indeks sebesar 0,5. Angka tersebut berarti bahwa kinerja BAZNAS Jawa Timur pada variabel ini adalah cukup baik.

Variabel Rasio jumlah muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga daerah

Penilaian pada variabel ini bertujuan untuk menampilkan persentase perbandingan antara jumlah yang sudah membayar zakat melalui BAZNAS Jawa Timur dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Koordinasi peneliti dengan pihak BAZNAS mendapatkan data bahwa jumlah muzakki individu yang terdaftar di BAZNAS Jawa Timur adalah sejumlah 7.997 muzakki. Data BPS Jawa Timur tahun 2018 menunjukkan jumlah rumah tangga sebanyak 10.905.696. Untuk menemukan nilai rasio muzakki individu maka dibuat formula seperti di bawah ini:

$$\frac{7.997}{10.905.696} \times 100\% = 0,0733\%$$

Persentase sebesar 0,0733% pada skoring skala likert mendapatkan skor 1 karena jumlah tersebut berada di bawah 1%. Untuk mendapatkan nilai indeks pada variabel rasio muzakki individu maka perlu dilakukan penghitungan seperti di bawah ini:

$$\frac{1-1}{5-1} = 0$$

Nilai nol menunjukkan kondisi kinerja yang tidak baik oleh BAZNAS Jawa Timur pada variabel ini. Angka persentase yang didapat menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang tidak membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Jawa Timur.

Variabel Rasio jumlah muzakki badan terhadap jumlah badan usaha daerah

Berdasarkan data BPS Jawa Timur tahun 2017, terdapat 814.848 badan usaha. Badan usaha yang mana membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur hanyalah 5 badan usaha atau setara dengan 0,00061%. Angka persentase tersebut menunjukkan jumlah di bawah satu persen yang pada skoring skala likert mendapatkan skor 1. Skor tersebut jika dimasukkan ke dalam formula penghitungan nilai indeks menghasilkan nilai nol yang menunjukkan BAZNAS Jawa Timur memiliki kinerja yang tidak baik pada variabel ini.

Serangkaian penghitungan terhadap 3 variabel pembentuk indikator database lembaga zakat diatas menghasilkan nilai indeks 0,5 untuk variabel jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, mustahik. Nilai 0 untuk masing-masing variabel rasio muzakki individu dan variabel rasio muzakki badan usaha. Angka yang didapat dari tiga variabel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam formula di bawah untuk mendapatkan nilai indeks dari indikator database lembaga zakat.

$$\begin{aligned} X_{13} &= 0,30X_{131} + 0,40X_{132} + 0,30X_{133} \\ &= 0,30(0,5) + 0,40(0) + 0,30(0) \\ &= 0,15 \end{aligned}$$

Simbol X_{13} pada formula di atas menunjukkan nilai indeks indikator data base lembaga zakat. Kemudian pada simbol X_{131} merupakan nilai indeks variabel lembaga zakat resmi, muzakki, mustahik. Sedangkan X_{132} adalah simbol yang menunjukkan nilai indeks variabel rasio muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga. Dan yang terakhir adalah simbol X_{133} yang mana merupakan nilai indeks variabel rasio muzakki badan terhadap jumlah badan usaha.

Indeks Dimensi Makro

Tahap-tahap penghitungan nilai indeks dari ketiga indikator pembentuk dimensi makro menghasilkan angka 0,5 untuk indikator regulasi, kemudian nilai indeks indikator dukungan APBD adalah 0,25 dan yang terakhir angka 0,15 didapat oleh indikator database lembaga zakat. Nilai-nilai indeks yang sudah disebutkan sebelumnya kemudian dimasukkan ke dalam formula di bawah ini untuk mendapatkan nilai indeks dari dimensi makro.

$$\begin{aligned} X_1 &= 0,40X_{11} + 0,20X_{12} + 0,40X_{13} \\ &= 0,40(0,5) + 0,20(0,25) + 0,40(0,15) \end{aligned}$$

= 0,31

Formula di atas menunjukkan bahwa X_1 adalah nilai indeks dimensi makro. Sedangkan simbol X_{11} adalah indeks indikator regulasi. Kemudian simbol X_{12} adalah nilai indeks indikator dukungan APBD. Sedangkan simbol X_{13} adalah nilai dari indeks indikator database lembaga zakat.

Hasil yang didapat BAZNAS Provinsi Jawa Timur pada dimensi makro adalah 0,31 yang mana menunjukkan nilai yang kurang baik. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih rendahnya dukungan APBD untuk biaya operasional BAZNAS dan nilai rasio muzakki baik individu maupun badan usaha yang masih sangat rendah.

Analisis Hasil Penelitian

Kinerja pengelolaan zakat pada dimensi makro ditentukan oleh tiga indikator, yaitu regulasi, dukungan APBD, dan database lembaga zakat. Bobot terbesar dalam analisis dimensi makro terletak pada indikator regulasi karena BAZNAS Jawa Timur memiliki peraturan dalam bentuk INSTRUKSI Gubernur.I/INST/2017. Keberadaan instruksi Gubernur tersebut sudah cukup baik namun lebih baik jika BAZNAS Jawa Timur bisa memiliki perda pada tingkat Provinsi untuk semakin meningkatkan jumlah pengumpulan zakat melalui instansi-instansi pemerintah. Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia menyebutkan bahwa kota pertama yang memiliki perda tentang pengelolaan zakat adalah Kota Cilegon yaitu pada tahun 2001 (Khoirunnisa, 2017). Dengan adanya perda zakat tersebut, Kota Cilegon dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat. Hal ini membuktikan bahwa adanya regulasi berupa perda tentang zakat di suatu daerah dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat.

Indikator dukungan APBD juga masih memiliki nilai indeks yang rendah karena jumlah dukungan APBD yang disalurkan untuk operasional BAZNAS hanya setara dengan 22,48% atau tepatnya sebesar Rp 300.000.000 dari biaya operasional sebesar Rp 1.334.511.618,00. Dukungan APBD tersebut berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2019 sebesar Rp 300.000.000,00 namun pada 2020 sudah mengalami peningkatan menjadi Rp 500.000.000,00 berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pendistribusian. Jika BAZNAS mampu mendapatkan dukungan APBD yang lebih besar maka BAZNAS bisa melakukan distribusi dana yang lebih maksimal karena dana yang didapat tidak dipakai untuk biaya operasional. Saf (2015) membuktikan kontribusi positif peran pemerintah yang mengalokasikan dana APBD untuk zakat dengan studi kasus pada BAZ Mojokerto. Studi Mojokerto didapatkan bahwa terdapat peningkatan hasil penerimaan karena adanya peningkatan jumlah muzakki yang membayar zakat melalui lembaga zakat. Dana APBD digunakan untuk biaya operasional seluruhnya sehingga dana zakat yang terhimpun dapat difokuskan untuk penyaluran zakat kepada mustahik.

Indikator selanjutnya adalah database lembaga zakat memiliki nilai indeks sebesar 0.15 yang termasuk kategori tidak baik. Buruknya nilai database lembaga zakat ini diakibatkan oleh kurangnya jumlah muzakki baik dalam bentuk badan maupun muzakki individu. Jumlah muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Jawa Timur sangat rendah dibandingkan dengan jumlah rumah tangga maupun badan usaha yang ada di Jawa Timur. Nilai yang rendah ini seharusnya bisa ditingkatkan jika BAZNAS memiliki Perda yang mengharuskan lembaga pemerintahan dan juga aparaturnya untuk membayar zakat melalui BAZNAS Jawa Timur sehingga rasio muzakki individu maupun badan usaha bisa meningkat dan nilai indeks Indikator Database Lembaga Zakat juga meningkat.

V. SIMPULAN

Dimensi makro BAZNAS Provinsi Jawa Timur mendapatkan nilai indeks sebesar 0,31, menandakan bahwa kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Timur adalah kurang baik. Dimensi makro terdiri dari indikator regulasi, dukungan APBD, dan database lembaga zakat.

Kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Timur pada indikator regulasi adalah cukup baik dengan skor indeks 0,5. Kinerja ini dicapai karena BAZNAS Jawa Timur sudah memiliki regulasi dalam bentuk Instruksi Gubernur pada tahun 2017. Selibuhnya BAZNAS Jawa Timur menjalankan kegiatan perzakatan berlandaskan undang-undang yang berlaku secara umum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS Jawa Timur belum memiliki Perda pada tingkat provinsi sehingga tidak

bisa mendapat skor maksimal pada indikator ini. Indikator dukungan APBD pada BAZNAS Jawa Timur mendapatkan nilai 0,25. Nilai tersebut merupakan nilai yang kurang baik. Dukungan APBD terhadap biaya operasional BAZNAS hanya mencapai angka 22,48%. Indikator selanjutnya pada dimensi makro adalah Database lembaga zakat yang setelah dilakukan penghitungan mendapat nilai 0,15, menandakan kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Timur pada indikator ini adalah tidak baik. Kinerja yang tidak baik dari indikator database lembaga zakat akibat buruknya variabel rasio muzakki. Buruknya nilai dari variabel rasio muzakki baik individu maupun badan usaha karena jumlah muzakki yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Jawa Timur terlalu sedikit dibandingkan jumlah keseluruhan rumah tangga dan badan usaha yang ada di Provinsi Jawa timur

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah penduduk miskin menurut provinsi, 2007-2020*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah perusahaan, tenaga kerja, investasi, dan nilai produksi menurut kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur, 2017*. Retrieved from <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/15/1943/jumlah-perusahaan-tenaga-kerja-investasi-dan-nilai-produksi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017-.html>
- Khoirunnisa, A. A. (2017). *Analisis kinerja baznas kabupaten Cilacap dengan pendekatan indeks zakat nasional*. Skripsi tidak dipublikasikan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Mubarokah, I. (2017). *Analisis kinerja perzakatan provinsi Jawa Tengah*. Skripsi tidak dipublikasikan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2016). *Indeks zakat nasional*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Revisi komponen dan formula penghitungan indeks zakat nasional*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS
- Putri, Y. H. (2017). *Analisis kinerja pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota Yogyakarta*. Skripsi tidak dipublikasikan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Saf, M. A. (2015). Efektivitas pelaksanaan perda pengelolaan zakat di kota Mojokerto dan kabupaten Sidoarjo. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(2), 312-332. <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.312-332>